Kajian *Good Governance*: Studi di Pemerintah Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat Tahun 2011

Oleh:
Auradian Marta dan Raja Muhammad Amin

Abstract

This research backgrounded by achievement Nagari Simarasok government to role model village in Indonesia at 2011. This study describes implementation Nagari Simarasok government so succesfull to get predicate the best village in national level. It used qualitative method with information and date were obtained indepth interview key persons likes wali nagari, kepala jorong, socialite, local government, private sector, and civil society and from the documents available in the village office. The results form research show that Nagari Simarasok government has been practiced the principle of good governance and coordination with private sector and civil society. Synergi of the governance actor is the key Nagari Simarasok government succesfull at 2011.

Keywords: *Nagari Simarosok, good governance, governance*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh prestasi pemerintah nagari Simarasok menjadi desa teladan tingkat nasional pada tahun 2011. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan praktek penyelenggaraan pemerintahan nagari Simarasok sehingga berhasil meperoleh prediket desa berprestasi tingakat nasional tersebut. Penelitian ini digunkan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Adapun informan penelitian ini yaitu wali nagari, kepala jorong, tokoh masyarakat, unsur pemerintah daerah dan masyarakat serta sector swasta. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa pemerintah nagari Simarasok telah mempraktekkan prinsip-prinsip *good governance* dan bersinergi dengan pihak swasta dan masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sinergitas elemen *governance* menjadi dasar suksesnya program-program pemerintah nagari pada tahun 2011.
Kata kunci: pemerintah nagari, *good governance*, sinergitas *governance*

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan desa merupakan level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga berimplikasi langsung terhadap kehidupan masyarakat di suatu daerah. Dinamika pemerintahan desa khususnya aspek demokratisasi di Indonesia dalam perkembangannya mengalami “pasang surut”. Dinamika ini menurut hemat penulis

adalah dilatarbelakangi oleh peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh rezim yang berkuasa pada saat itu.

Pada era Orde Baru, perkembangan pemerintahan daerah umumnya pemerintahan desa pada khususnya mengalami stagnasi dan terbelenggu akibat pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Permintahan di Daerah dan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 pada intinya membuat demokrasi tidak berjalan dalam pemerintahan desa dengan adanya penyeragaman istilah "desa" sehingga menghilangkan nilai-nilai asli yang berada di desa bersangkutan. Nilai-nilai asli yang berupa adat istiadat dan budaya setempat menjadi termarginalkan akibat pemberlakuan peraturan perundang-undangan ini.

Namun seiring perkembangan politik dan pemerintahan secara nasional dengan arus demokrasi yang semakin gencar mengakibatkan tumbangnya rezim Orde Baru dan berganti dengan era reformasi membuat UU Nomor 5 Tahun 1975 ini dicabut dan diganti UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya desentralisasi dan demokratisasi yang menjadi roh dari UU Nomor 22 Tahun 1999 jo UU Nomor 32 Tahun 2004, pemerintahan desa kembali menjadi jati dirinya dengan hak asal usul dan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Tidak terkecuali pemerintahan desa yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang dikenal dengan istilah "Pemerintahan Nagari".

Pemerintahan nagari menarik untuk dikaji karena keunikannya dalam penyelengaraan pemerintahan yang masih tetap berpedoman kepada nilai-nilai adat istiadat. Kajian ini difokuskan kepada penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat. Pemilihan Pemerintahan Nagari

Simarasok ini berdasarkan atas prestasinya sebagai pemerintahan desa berprestasi tingkat nasional tahun 2011.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi fenomena masalah penelitian sebagai berikut:

1. Pemerintahan Nagari Simarasok memperoleh prestasi level nasional yaitu pemerinatah desa berprestasi tahun 2011.
2. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di nagari simarasok
3. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam memajukan nagari simarasok

   (sumber wawancara dengan Wali Nagari Simarasok, 26 Mei 2012)

Dari identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu bagaimana pemerintahan nagari simarasok dalam menjalankan pemerintahannya tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan penyelenggaraan pemerintahan nagari simarasok tahun 2011.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam era reformasi saat ini tuntutan terhadap pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa menjadi suatu keharusan. Paradigama ini dikenal dengan konsep *Good Governance* yang telah mengemuka sejak dipopulerkan oleh The World Bank pada tahun 1994. Pada awalnya konsep good governance ini hanya terbatas pada pembenahan system penyelenggaraan pemerintahan khususnya dibidang ekonomi. Kondisi yang ada di Afrika

yang menunjukkan bahwa hubungan clientelism akan mengakibatkan pembangunan menjadi terhambat (Robinson and Parsons, 2006). Oleh karena itu The World Bank, menilai bahwa pentingnya adanya aturan main dan proses yang bisa menjamin pemerintahan bekerja dengan baik, melainkan juga menyangkut keterlibatan actor (Peters and Pierre, 1998). UNDP memberikan defenisi terhadap *governance* yaitu penyelenggaraan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola nasional pada semua level. Secara lengkap UNDP memberikan defenisi good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara Negara, sector swasta dan masyarakat (society).

Oleh karena itu, institusi dari governance meliputi tiga domain yaitu *state* (Negara atau pemerintah), *private sector* (pelaku ekonomi/swasta) dan *society* (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsi masing-masing. Sebagaimana konsep UNDP tentang *good governance* yang terdiri dari tiga domain tersebut maka secara skematis dapat dilihat sebagai berikut:

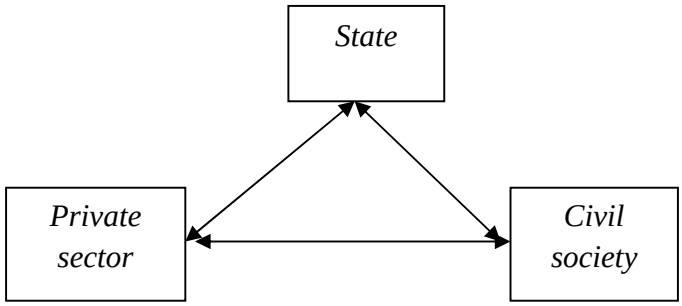

Good governance akan berjalan apabila terjadi interaksi yang harmonis dan seimbang diantara ketiga domain ini. Berdasarkan hal ini kemudian dapat diajukan sembilan karektiristik *good governance* yaitu sebagai berikut:

1. *Participation* yaitu setiap warga Negara mempunyai hak suara dalam pengambilan keputrusan baik secara langsung maupun secara intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
2. *Rule of law* yaitu kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu terutama dalam pengekan HAM.
3. *Tranparancy* yaitu keterbukaan yang dibangun di atas dasar kebebasan arus informasi.
4. *Responsiveness* yaitu penyelenggaraan pemerintahan harus selalu tanggap terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
5. *Consensus orientation* yaitu para penyelenggara pemerintahan hendaknya menyadari bahwa pemerintahan adalah milik masyarakat sehingga mengangap masyarakat sebagai pelanggan maka birokrasi bertugas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
6. *Equity* yaitu semua warga Negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan pemerintah.
7. *Effectiveness* dan *efficiency* yaitu penyelenggaraan pemerintahan harus senantiasa didasarkan atas perhitungan yang logis tentang hasil yang diperoleh dengan anggaran yang dikeluarkan.
8. *Accountability* yaitu setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengeluaran anggaran Negara harus senantiasa dapat dipertanggungjawabkan kepada public sebagai *stake holders*.
9. *Strategy vision* yaitu pemerintahan yang digerakkan oleh misi yang luas dan jauh kedepan yang dapat mengarahkan masyarakat dalam melayani dirinya sendiri. (Hetifah Sj Sumarto, 2004).

Jika *Good Governance* diposisikan dalam ruang lingkup desa maka ada beberapa hal diperhatikan yaitu isu pemerintahan yang demokratis (*democratic governance*) yaitu pemerintahan desa yang berasal dari partispasi masyarakat, dikelola "oleh" (akuntabilitas,transparan) masyarakat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya "untuk" (responsivitas) masyarakat. Kedua, hubungan antar elemen *governance* di desa yang didasarkan pada prinsip kesejajaran, keseimbangan dan kepercayaan (AAGN Ari Dwipaya dkk, 2003).

E. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Artinya, penelitian ini mencoba mendeskripsikan penyelenggaraan pemerintahan nagari Simarasok dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini lebih menekankan analisisnya pada proses pengambilan keputusan secara induktif dan juga deduktif serta analisis pada fenomena dengan metode ilmiah (Burhan Bungin, 2001).

b. Lokasi Penelitian

Lokus dalam penelitian ini adalah nagari simarasok kecamatan baso kabupaten agam Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini karena berhubungan dengan masalah penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan. Nagari simarasok ini juga merupakan pemerintahan desa yang mendapat juara I dalam lomba pemerintahan desa tingkat nasional.

c. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan dan key informan.

2. Data sekunder

   Data sekunder dalam penelitian ini berupa data dokumen yang menunjang terjawabnya pertanyaan penelitian seperti profil nagari dan dokumen penyelenggaraan pemerintahan.

d. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan penelitian yang ditentukan berdasarkan kepada teknik *purposive sampling* yaitu sebagai berikut: wali nagari, kepala jorong, tokoh masyarakat, unsur pemerintah daerah dan masyarakat serta sector swasta.

e. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Studi Dokumentasi

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Istilah Simarasok berasal dari Sei Marasok, sei artinya sungai dan marasok artinya meresap atau merembes. Sei Marasok artinya sungai yang meresap atau merembes memasuki tanah atau bukit, bukan sungai yang muncul dari dalam tanah. Nagari Simarasok sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 tahun 2001 tentang Pemerintahan nagari yang dimulai tahun 2002, dan sekarang diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari yang berlaku, maka Pemerintahan Nagari Simarasok telah menyelenggarakan urusan

rumah tangga nagari berdasarkan otonomi yang dimiliki dengan mengembangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis.

Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Pemerintahan Nagari Simarasok membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) 2011-2016. Adapaun visi Pemerintahan Nagari Simarasok adalah "Terwujudnya Nagari Simarasok sebagai Nagari Mandiri untuk Kesejahteraan". Dengan adanya visi tersebut maka pembangunan di nagari akan lebih terarah.

Perlombaan desa berprestasi tingkat nasional tahun 2011 menghasilkan Nagari Simarasok menjadi desa terbaik di Indonesia. Ada beberapa indikator yang dijadikan oleh pemerintah pusat dalam menilai pemerintahan desa yaitu:

a. penyelenggaraan pemerintahan desa
b. pembangunan dan partisipasi masyarakat
c. pembinaan kelembagaan masyarakat desa.

Indikator inilah yang menjadi dasar Pemerintahan Nagari Simarasok menjadi desa berprestasi tingkat nasional.

Namun dalam kajian ini penulis menggunakan kerangka konsep *good governance* dalam menganalisis penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Simarasok tahun 2011. Dalam konsep *good governance* terdeskripsi bahwa ada sinergitas antara actor *governance* seperti pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini yang penulis temui di lapangan penelitian bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintahan Nagari Simarasok telah mempraktekkan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu yang menonjol dalam

praktek penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu partisipasi masyarakat nagari yang sangat tinggi.

Dalam penyelenggaran pemerintahan maupun kehidupan kemasyarakatan, Pemerintahan Nagari Simarasok selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan. Seperti contoh dalam perencanaan pembangunan nagari yang melibatkan seluruh elemen masyarakat baik dari pemerintahan nagari itu sendiri, tokoh adat, tokoh agama yang dikenal dengan istilah "tigo tungku sajarangan" kemudian masyarakat secara keseluruhan. Pepatah ini menjadi dasar filosofi pemerintahan nagari dan masyarakat dalam mengeluarkan sebuah kebijakan. Selain daripada perencanaan pembangunan masyarakat juga dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan seperti kegiatan gotong royong yang dilakukan ibu PKK secara rutin setiap bulan disalah satu jorong di nagari Simarasok yaitu jorang Sungai Angek.

Bentuk partisipasi masyarakat Nagari Simarasok terlihat jelas dari bangunan balai nagari yang sumber dananya berasal dari swadaya masyarakat itu sendiri. Tidak hanya itu swadaya masyarakat nagari Simarasok lebih besar 2 (dua) kali lipat dari dana yang diberikan oleh pemerintah kepada nagari. Tahun 2009-2010, swadaya masyarakat nagari Rp.6.543.007.000,- sedangkan dari pemerintah daerah Rp.3.233.000.000,- (wawancara dengan wali nagari, Juli 2012). Swadaya masyarakat nagari Simarasok ini mengindikasikan partispasi masyarakat sangat tinggi terhadap kesuksesan pemerintahannya.

Sinergitas antar aktor *governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Simarasok terdeskripsi dalam berbagai kegiatan. Adapun aktor yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari bagan di bawah ini:

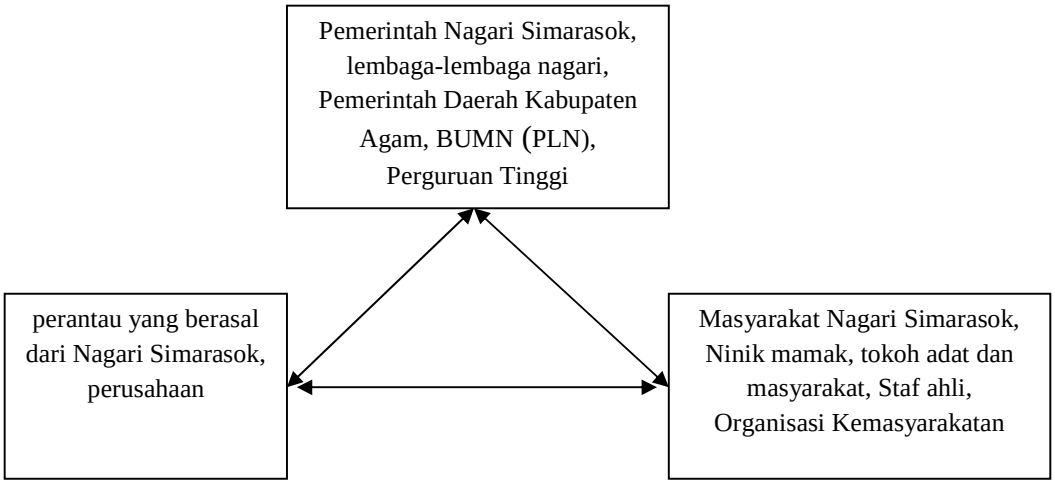

Sumber: Data olahan peneliti, 2012

Sinergitas antar aktor *governance* di atas, terdeskripsi dalama salah satu program unggulan nagari Simarasok yaitu mendesain basis data dan foto udara nagari sehingga potensi yang ada dapat diidentifikasi dalam rangka pengembangan daerah. Dalam program ini pemerintah nagari Simarasok bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam serta pihak perguruan tinggi seperti Universitas Andalas dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), staff ahli, PLN, perusahaan, perantau dan seluruh komponen kelembagaan nagari serta masyarakat.

Partisipasi yang berbeda diberikan setiap aktor sesuai dengan kompetensi dan sumber daya yang dimiliki. Seperti yang dilalkukan oleh pihak Perguruan Tinggi ialah dengan melakukan pendampingan kepada pemerintah Nagari dalam program kerja tersebut. Perguruan Tinggi berkewajiban melaksanakan Tri Dharma yang salah satunya mengabdi kepada masyarakat. Bekal ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh kaum akademisi di sekitar nagari Simarasok sangat membantu pemerintah Nagari dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Nagari Simarasok juga dibantu oleh 5 (lima) orang staff ahli yang focus kepada beberapa bidang yaitu bidang infrastruktur dan sistem informasi, perencanaan wilayah, agribisnis terpadu, industry kerakyatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Staff ahli ini berasal dari nagari Simarasok, perantau dan anak nagari dari nagari Simarasok. Tujuan dibentuknya staff ahli ini dengan maksud meningkatkan proses pembangunan nagari yang berkelanjutan dengan menggabungkan IPTEK beserta inovasi-inovasi dengan kondisi daerah sesuai potensi yang ada dan bagaimana memanfaatkan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pembangunan. Hal ini memperlihatkan responsivitas dari komponen yang ada dalam membangun daerahnya lebih baik lagi.

Tidak hanya kontribusi yang berbentuk immaterialseperti pemikiran yang tertuang dalam ide-ide kreatif, pemerintah nagari Simarasok juga mendapat kontribusi berupa dana atau sumbangan yang diperoleh dari perusahaan yang berada dilingkungan sekitar nagari dan perantau yang berasal dari nagari itu sendiri. Peran serta *private sector* ini sangat membantu pemerintahan nagari Simarasok dalam mensukseskan program yang telah direncanakan.

Hampir setiap kegiatan yang direncanakan oleh pemerintahan nagari Simarasok melibatkan kelembagaan nagari dan masyarakat, Masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan melainkan sebagai subjek atau pelaku dari pembangunan tersebut. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut membawa dampak positif bagi keberlanjutan pembangunan karena masyarakat diajak merasa memiliki nagari dengan demikian masyarakat mempunyai tanggungjawab yang sama dalam pencapaian visi nagari.

Kerjasama yang berkesinambungan dibangun dengan begitu baik dalam upaya percepatan pencapaian tujuan bersama. Penyelenggaraan pemerintahan di nagari Simarasok ini merupakan cerminan dari perwujudan *Good Governance* baik dari pemaknaan nilai atau prinsip maupun dari sisi sinergitas dan keterlibatan antar aktor *governance*. Wajar kiranya jika pemerintahan nagari Simarasok menjadi desa berprestasi tingkat nasional yang perlu dicontoh oleh pemerintah desa lainnya di Indonesia.

Banyak yang bisa membangun daerahnya dengan dukungan kekuatan dana yang melimpah dari pemerintah daerahnya, tetapi pemerintah nagari Simarasok membuktikan bahwa kekuatan yang perlu dilestarikan adalah keterlibatan seluruh komponen baik dari unsur pemerintah, *private sector* atau pihak swasta dan masyarakat sipil dalam pembangunan. Relasi yang terbentuk adalah sebagai mitra sejajar yang saling bahu membahu untuk mewujudkan visi bersama, bukan hubungan yang mendominasi satu dengan yang lainnya yang mengakibatkan pertentangan yang mengarah kepada terciptanya konflik.

G. Simpulan

Dari eksplanasi di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan nagari Simarasok Tahun 2011 dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip *good governance*. Pemerintahan Nagari Simarasok bersinergi dengan pihak swasta dan masyarakat sipil dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Sinergitas yang terbangun dari elemen *governance* tersebut mengakibatkan program kerja yang telah dirancang dapat diselesaikan dengan baik sehingga menjadi sebuah nagari atau desa percontohan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bungin, Burhan.2001. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Perss.

Dwipaya, Ari AAGN.2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE).

Sumarto, Hetifah Sj. 2004. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

Robinson, JA & Parsons QN, 2006, *State Formation and Governance in Bostwana*, Journal of African of Economies

Peters BG & Pierre J, 1998, *Governance Without Government? Rethingking Public Administration*, Journal of Public Administration Research and Theory